

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"

- TEMA** : Meniklik Kebijakan Ekonomi Makro dan Fiskal 2027
- Pemateri** :
1. Putu Rusta Adijaya (Peneliti Bidang Ekonomi, TII)
 2. Roby Rushandie (Research and Knowledge Manager, The PRAKARSA)
 3. Ratih Purbasari Kurnia (Direktur Perencanaan SDA, Kementerian Investasi)
- Moderator** : Afifah Fitriyani (Peneliti Bidang Hukum, TII)
- Partisipan** : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

Dalam sesi diskusi, Putu menjelaskan bahwa tingginya konsumsi pemerintah pada dasarnya bukan merupakan persoalan selama pengeluaran tersebut mampu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi yang produktif. Namun, ia mengingatkan bahwa kondisi ketika belanja pemerintah terus meningkat sementara upah riil masyarakat mengalami penurunan perlu menjadi perhatian serius. Menurutnya, situasi tersebut dapat menciptakan ketidakseimbangan ekonomi dan berpotensi melanggengkan pola konsumsi yang tidak produktif di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap pengeluaran publik benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui investasi pada sektor-sektor strategis.

Lebih lanjut, Putu menegaskan bahwa penerimaan negara, khususnya yang berasal dari pajak, harus dikelola secara transparan dan akuntabel untuk memperkuat layanan publik serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Menurutnya, alokasi anggaran perlu diprioritaskan untuk sektor kesehatan dan pendidikan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong transformasi ekonomi melalui pengembangan industri yang mampu menghasilkan produk ekspor dengan nilai tambah tinggi dan tingkat teknologi yang lebih maju. Dalam konteks tersebut, penegakan hukum dan penguatan integritas pemerintah menjadi faktor penting agar berbagai sumber penerimaan negara dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat luas.

Sementara itu, Ratih menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mendorong kebijakan hilirisasi sebagai strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas ekspor Indonesia. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap produk yang diekspor tidak lagi didominasi bahan mentah, melainkan produk olahan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Namun demikian, ia mengakui bahwa upaya meningkatkan investasi masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya terkait implementasi kebijakan di lapangan. Salah satu persoalan yang masih sering dihadapi adalah proses perizinan, termasuk perizinan lahan, yang kerap menjadi hambatan bagi investor.

Menanggapi isu investasi, Putu dan Roby menegaskan bahwa reformasi kepastian usaha merupakan salah satu prasyarat utama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Mereka menilai bahwa investor membutuhkan kepastian hukum, stabilitas politik dan ekonomi, serta kejelasan arah kebijakan pemerintah dalam jangka panjang. Dalam sesi tanya jawab, peserta turut menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menarik investasi, termasuk konsistensi kebijakan pemerintah dan dampaknya terhadap kepercayaan investor. Menanggapi hal tersebut, para narasumber menekankan bahwa perubahan arah kebijakan yang terlalu sering dapat menciptakan ketidakpastian dan meningkatkan persepsi risiko investasi.

Sebagai contoh, Putu dan Roby menyoroti dinamika pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pada masa pemerintahan sebelumnya, proyek IKN dipromosikan secara luas kepada investor global dan telah memiliki dasar hukum yang kuat. Namun, perubahan narasi mengenai status ibu kota yang kembali berpusat di Jakarta dinilai dapat menimbulkan kebingungan di kalangan investor. Menurut mereka, situasi semacam ini berpotensi mencoreng kepercayaan investor terhadap konsistensi kebijakan pemerintah, terutama ketika perubahan terjadi setelah investasi dan komitmen pembangunan telah diperkenalkan secara luas kepada publik internasional.

Pada akhir diskusi, Roby menyampaikan bahwa pembangunan ekonomi yang tangguh tidak hanya bergantung pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada kemampuan negara memastikan hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan instrumen-instrumen redistributif yang mampu melindungi kelompok rentan sekaligus memperkuat keadilan sosial. Menurutnya, kombinasi antara kepastian usaha, tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan hukum yang konsisten, dan kebijakan redistributif yang efektif merupakan fondasi penting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia.

Catatan :

- 1. Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum>*
- 2. Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”.*

TERIMA KASIH ~